



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
2025**

KATA PENGANTAR

Nomor : 560/1951/016/2025

Perubahan Rencana Kerja sebuah perangkat daerah senantiasa selalu dinamis mengikuti dengan perubahan peraturan, situasi dan kondisi yang juga selalu berubah dan berkembang. Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen merupakan acuan perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberi arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yaitu **Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya berlandaskan Semangat Gotong Royong**. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sragen tersebut, visi dijabarkan dalam beberapa misi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berperan dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Menangani Kemiskinan memperluas Kesempatan Kerja”.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan untuk dimasa yang akan datang.

Sragen, 03 Juli 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen



Agus Winarno, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II	12
Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	34
3.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	35
BAB IV PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance dalam hal pertanggungjawaban pemerintah untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, setiap perangkat daerah berperan sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sementara menurut Abe (2001) Perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni: (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktivitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan (6) sumber daya yang dibutuhkan.

Bersesuaian dengan pendapat di atas, Tjokroamidjojo (1992) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya, kemudian memilih arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Rencana dapat berupa rencana informal atau formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana

bersama anggota organisasi. Setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Manfaat perencanaan bagi organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat dikatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Tenaga Kerja Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan sumber daya mineral yang diberikan kepada daerah yang bersifat tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

berupa penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Renja Dinas Tenaga Kerja.

Renja Tahun 2025 telah berhasil disusun dan dilaksanakan, namun dalam perjalanannya, terdapat ketidaksesuaian dokumen rencana kerja dengan perkembangan keadaan antara lain karena adanya rasionalisasi/refocussing anggaran, sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain dikarenakan:

- a. Adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 287.093.900,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk efisiensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2025;
- b. Adanya perubahan rincian belanja pada beberapa sub kegiatan yang ada, diantaranya :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
 - 13) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - 14) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
 - 15) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;

- 16) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
- 17) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 18) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;
- 19) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil;
- 20) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 21) Pelayanan Antar Kerja;
- 22) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
- 23) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 24) Perluasan Kesempatan Kerja;
- 25) Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi;
- 26) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS;
- 27) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- 28) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- 29) Job Fair/Bursa Kerja;
- 30) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- 31) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
- 32) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan;
- 33) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
- 34) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan;
- 35) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
- 36) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 37) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- 38) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
 - 39) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
 - 40) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
 - 41) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 42) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Adanya perubahan target kinerja pada beberapa sub kegiatan, diantaranya :
- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; perubahan target kinerja dari 564 orang menjadi 820 orang.
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil; perusahaan target kinerja dari 40 perusahaan menjadi 20 perusahaan.
 - c. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; perubahan target kinerja dari 1 kepala keluarga menjadi 2 kepala keluarga

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada Renja 2025 yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya rencana kerja akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan, dan kemudian menjadi dokumen pelaksanaan anggaran melalui penetapan APBD perubahan Kabupaten Sragen.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 590);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 30).

1. 3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam pelaksanaan pembangunan sektor tenaga kerja selama 1 (satu) tahun berjalan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Untuk penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang tenaga kerja.
3. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang tenaga kerja.
4. Untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga harus dievaluasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen pada Belanja Langsung Anggaran Penetapan Tahun 2025 melaksanakan 6 Program, 19 Kegiatan dan 44 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.232.790.778 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.129.026.610 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau mencapai 36,39 % (tiga puluh enam koma tiga puluh sembilan persen) terhadap target pagu anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
sampai dengan Triwulan II

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						42,99	36,39		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						53,03			
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						59,41			
Dinas Tenaga Kerja									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.232.790.778		4.129.026.610		36,76
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			11.232.790.778		4.129.026.610		36,76

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	8.909.578.426	36,66	3.828.511.220	36,66	42,97
2.07.0 1.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [%]	100,00	2.745.500	40,00	0	40,00	0,00
2.07.0 1.2,01. 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	5,00	2.745.500	2,00	0	40,00	0,00
2.07.0 1.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	7.318.492.428	50,00	3.326.946.729	50,00	45,46

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 1.2,02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	58,00	7.318.492.428	58,00	3.326.946.729	100,00	45,46
2.07.0 1.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah [%]	100,00	117.778.400	25,00	10.705.412	25,00	9,09
2.07.0 1.2,06. 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	10.867.000	0,50	300.000	50,00	2,76
2.07.0 1.2,06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	33.471.400	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,06. 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	19.645.000	0,50	7.165.000	50,00	36,47

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 1.2,06. 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	10.272.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,06. 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12,00	34.500.000	6,00	3.240.412	50,00	9,39
2.07.0 1.2,06. 0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	12,00	9.023.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100,00	1.189.169.000	33,33	417.263.965	33,33	35,09
2.07.0 1.2,08. 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	1,00	470.000.000	0,50	132.768.965	50,00	28,25

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 1.2,08. 0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	10.626.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,08. 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	708.543.000	6,00	284.495.000	50,00	40,15
2.07.0 1.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100,00	281.393.098	25,00	73.595.114	25,00	26,15

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 1.2,09. 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	45,00	188.210.000	19,00	73.595.114	42,22	39,10
2.07.0 1.2,09. 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	93.183.098	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						73,32	42,97	36,66	42,97
Predikat kinerja						S	SR	SR	SR
2.07.0 2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun [%]	100,00	23.930.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 2.2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) [%]	70,00	23.930.000	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 2.2,01. 0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro [Dokumen]	1,00	14.773.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 2.2,01. 0003		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro [Orang]	5,00	9.157.000	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR
2.07.0 3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI [%]	60,00	1.914.810.202	10,20	297.038.410	17,00	15,51
2.07.0 3.2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi [%]	95,00	1.832.543.752	23,75	285.111.775	25,00	15,56
2.07.0 3.2,01. 0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n [Orang]	724,00	1.827.856.552	412,0 0	285.111.775	56,91	15,60

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 3.2,01. 0002		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koor dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n [Lembaga]	1,00	4.687.200	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 3.2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta [%]	50,00	13.103.900	50,00	11.926.635	100,00	91,02
2.07.0 3.2,02. 0001		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina [Lembaga]	60,00	13.103.900	60,00	11.926.635	100,00	91,02
2.07.0 3.2,03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. [%]	57,00	5.031.650	5,70	0	10,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 3.2,03. 0001		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi [Perizinan]	5,00	5.031.650	1,00	0	20,00	0,00
2.07.0 3.2,04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil [%]	100,00	40.716.900	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 3.2,04. 0001		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas [Perusahaan]	40,00	40.716.900	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 3.2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota [%]	10,00	23.414.000	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 3.2,05. 0001		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah [Dokumen]	1,00	23.414.000	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						34,00	15,51	17,00	15,51
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR
2.07.0 4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja [%]	68,76	274.773.000	20,05	0	29,16	0,00
2.07.0 4.2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja [%]	100,00	26.405.750	13,54	0	13,54	0,00
2.07.0 4.2,01. 0002		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL [Orang]	40,00	7.013.500	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 4.2,01. 0003		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500,00	8.550.250	25,00	0	5,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			[Orang]						
2.07.0 4.2,01. 0004		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD [Orang]	100,00	1.866.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 4.2,01. 0005		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja [Orang]	16,00	8.976.000	16,00	0	100,00	0,00
2.07.0 4.2,02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota [%]	100,00	9.679.000	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 4.2,02. 0001		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi [Lembaga]	12,00	4.832.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 4.2,02. 0002		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku [Lembaga]	30,00	4.847.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 4.2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja [%]	100,00	198.698.500	54,31	0	54,31	0,00
2.07.0 4.2,03. 0001		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online [Dokumen]	12,00	4.906.000	6,00	0	50,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 4.2,03. 0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) [Orang]	1.500,0 0	7.470.000	1.694, 00	0	112,93	0,00
2.07.0 4.2,03. 0003		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja [Orang]	500,00	186.322.500	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 4.2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI [%]	100,00	39.989.750	48,80	0	48,80	0,00
2.07.0 4.2,04. 0001		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya [Orang]	10,00	22.928.500	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 4.2,04. 0002		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani [Orang]	500,00	3.657.250	732,00	0	146,40	0,00
2.07.0 4.2,04. 0003		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan [Orang]	10,00	13.404.000	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						58,32	0,00	29,16	0,00
Predikat kinerja						R	SR	SR	SR
2.07.0 5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan) [%]	85,00	109.699.150	39,24	3.476.980	46,16	3,17
2.07.0 5.2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) [%]	40,00	23.013.600	25,33	2.400.980	63,33	10,43

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 5.2,01. 0001		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online [Perusahaan]	5,00	3.838.200	2,00	787.500	40,00	20,52
2.07.0 5.2,01. 0002		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama [Perusahaan]	2,00	2.610.400	1,00	900.000	50,00	34,48

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 5.2,01. 0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan [Laporan]	25,00	16.565.000	20,00	713.480	80,00	4,31
2.07.0 5.2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial [%]	100,00	86.685.550	29,00	1.076.000	29,00	1,24

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 5.2,02. 0001		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah [Perkara]	25,00	13.822.050	12,00	0	48,00	0,00
2.07.0 5.2,02. 0002		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan [Perkara]	25,00	9.976.900	9,00	0	36,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.0 5.2,02. 0003		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi [Asosiasi dan Serikat Pekerja]	15,00	6.404.200	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 5.2,02. 0004		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina [Lembaga]	30,00	42.419.900	12,00	1.076.000	40,00	2,54
2.07.0 5.2,02. 0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja [Orang]	100,00	14.062.500	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						92,33	3,17	46,16	3,17
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			39.680.500		0		0,00
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			39.680.500		0		0,00
3.32.0 3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan [%]	100,00	39.680.500	0,00	0	0,00	0,00
3.32.0 3.2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah lokasi penyediaan Permukiman Transmigrasi [%]	100,00	39.680.500	0,00	0	0,00	0,00
3.32.0 3.2,01. 0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	1,00	9.922.000	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kabupaten/Kota [Laporan]						
3.32.0 3.2,01. 0004		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan [Kepala Keluarga]	1,00	29.758.500	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR
UPTD Technopark Ganesha Sukowati Sragen									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			75.000.000		0		0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			75.000.000		0		0,00
2.07.0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD [%]	100,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0,00
2.07.0 1.2,10. 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [Unit Kerja]	1,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan Renja Tahun 2025 adalah 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan serta 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.799.565.178,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Sedangkan pada perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja mengusulkan 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan perubahan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 11.146.151.440,00 (Sebelas miliar seratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS TENAGA KERJA				11.799.565.178	DINAS TENAGA KERJA				11.146.151.440	Berkurang 653.413.738
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.799.565.178	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.146.151.440	Berkurang 653.413.738
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				11.799.565.178	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				11.146.151.440	Berkurang 653.413.738
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.148.019.926	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.413.258.588	Berkurang 734.761.338
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2.745.500	Berkurang 2.254.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.745.500	Berkurang 2.254.500

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.318.492.428	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.822.992.428	Berkurang 495.500.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	7.318.492.428	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	6.822.992.428	Berkurang 495.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	214.547.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	117.777.400	Berkurang 96.770.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.867.000	Berkurang 4.133.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.547.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.470.400	Berkurang 41.077.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.645.000	Berkurang 5.355.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.272.000	Berkurang 4.728.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.500.000	Berkurang 40.500.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.023.000	Berkurang 977.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.214.999.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.189.168.000	Berkurang 25.831.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000	Sama
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.626.000	Berkurang 4.374.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	729.999.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	708.542.000	Berkurang 21.457.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	394.981.098	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	280.575.260	Berkurang 114.405.838
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	188.210.000	Berkurang 61.790.000
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	144.981.098	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	92.365.260	Berkurang 52.615.838
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	100%	25.399.700	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	100%	23.930.000	Berkurang 1.469.700
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.00%	25.399.700	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.00%	23.930.000	Berkurang 1.469.700
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	15.400.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	14.773.000	Berkurang 627.000
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	9.999.700	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	9.157.000	Berkurang 842.700

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60%	2.089.558.552	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60%	2.284.810.202	Bertambah 195.251.650
	Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95%	1.867.330.652	Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95%	2.202.543.752	Bertambah 335.213.100
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	564 Orang	1.857.330.652	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	820 Orang	2.197.856.552	Bertambah 340.525.900
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan/Koordin asi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	10.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan/Koordin asi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	4.687.200	Berkurang 5.312.800
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50%	20.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50%	13.103.900	Berkurang 6.896.100
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	20.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	13.103.900	Berkurang 6.896.100

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	57%	9.999.900	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	57%	5.031.650	Berkurang 4.968.250
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	9.999.900	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	5.031.650	Berkurang 4.968.250
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	167.228.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	40.716.900	Berkurang 126.511.100
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	41 Perusahaan	167.228.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	40.716.900	Berkurang 126.511.100
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10%	25.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10%	23.414.000	Berkurang 1.586.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	23.414.000	Berkurang 1.586.000
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase penempatan tenaga kerja	68.76%	326.724.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase penempatan tenaga kerja	68.76%	269.012.500	Berkurang 57.711.500
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100%	38.401.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100%	26.405.750	Berkurang 11.995.250

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	8.951.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	7.013.500	Berkurang 1.937.500
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	15.450.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	8.550.250	Berkurang 6.899.750
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	4.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	1.866.000	Berkurang 2.134.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	10.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	8.976.000	Berkurang 1.024.000
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	17.636.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	9.679.000	Berkurang 7.957.000
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 Lembaga	8.726.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 Lembaga	4.832.000	Berkurang 3.894.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 Lembaga	8.910.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 Lembaga	4.847.000	Berkurang 4.063.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	223.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	192.938.000	Berkurang 30.062.000
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	8.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	4.906.000	Berkurang 3.094.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	15.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	7.470.000	Berkurang 7.530.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	200.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	180.562.000	Berkurang 19.438.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100%	47.687.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100%	39.989.750	Berkurang 7.697.250

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	24.176.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	22.928.500	Berkurang 1.247.500
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 Orang	8.511.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 Orang	3.657.250	Berkurang 4.853.750
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	15.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	13.404.000	Berkurang 1.596.000
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85%	169.863.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85%	109.699.150	Berkurang 60.163.850

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40%	31.903.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40%	23.013.600	Berkurang 8.889.400
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusaha an	6.903.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusaha an	3.838.200	Berkurang 3.064.800
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusaha an	5.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusaha an	2.610.400	Berkurang 2.389.600
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	16.565.000	Berkurang 3.435.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100%	137.960.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100%	86.685.550	Berkurang 51.274.450
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara	21.750.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara	13.822.050	Berkurang 7.927.950
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	15.450.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	9.976.900	Berkurang 5.473.100

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6.404.200	Berkurang 3.595.800
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 Lembaga	75.360.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 Lembaga	42.419.900	Berkurang 32.940.100
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	15.400.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	14.062.500	Berkurang 1.337.500
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				40.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				45.441.000	Bertambah 5.441.000
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang ditempatkan	100%	40.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang ditempatkan	100%	45.441.000	Bertambah 5.441.000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase jumlah lokasi penyediaan Permukiman Transmigrasi	100%	40.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase jumlah lokasi penyediaan Permukiman Transmigrasi	100%	45.441.000	Bertambah 5.441.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	9.922.000	Berkurang 78.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	30.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	35.519.000	Bertambah 5.519.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				75.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				193.234.000	Bertambah 118.234.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				75.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				193.234.000	Bertambah 118.234.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	75.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	193.234.000	Bertambah 118.234.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD	100%	75.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD	100%	193.234.000	Bertambah 118.234.000

No	Penetapan					Perubahan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Penetapan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu perubahan	Catatan Penting (Berkurang/ Bertambah)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	75.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	193.234.000	Bertambah 118.234.000

Dari tabel di atas dapat diketahui, pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ada 6 program, 19 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dalam penetapan Tahun 2025, anggaran Dinas Tenaga Kerja sebanyak Rp 11.799.565.178,00 sedangkan perubahan Tahun 2025 anggaran Dinas Tenaga Kerja menjadi Rp 11.146.151.440,00. Ada 6 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang mengalami perubahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Anggaran semula Rp. 9.148.019.926,00 mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 734.761.338,00 sehingga menjadi Rp. 8.413.258.588,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

a. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran penetapan sebesar Rp. 5.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 2.254.500,00 sehingga menjadi Rp. 2.745.500,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

b. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran penetapan sebesar Rp. 7.318.492.428,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 495.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.822.992.428,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran untuk menekan silpa anggaran.

c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.133.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.867.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran penetapan sebesar Rp. 74.547.400,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 41.076.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.471.400,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran penetapan sebesar Rp. 25.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 5.355.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.645.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.728.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.272.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran penetapan sebesar Rp. 75.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 40.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 34.500.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 977.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.023.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

d. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran penetapan sebesar Rp 15.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.374.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.626.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran penetapan sebesar Rp. 729.999.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 21.457.000,00 sehingga menjadi Rp. 708.542.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

e. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran penetapan sebesar Rp. 250.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 61.790.000,00 sehingga menjadi Rp. 188.210.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran dan pengurangan pada alokasi BBM untuk pejabat eselon.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran penetapan sebesar Rp. 144.981.098,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 52.615.838,00 sehingga menjadi Rp. 92.365.260,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran dan pemindahan rekening belanja.

f. *Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD*

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Anggaran penetapan sebesar Rp. 75.000.000,00; dalam perubahan bertambah sebesar Rp. 118.234.000,00 sehingga menjadi Rp. 193.234.000,00. Penambahan pagu anggaran terjadi dikarenakan adanya penambahan silpa dari anggaran tahun 2024.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Anggaran semula Rp. 25.399.700,00 mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.469.700,00 sehingga menjadi Rp. 23.930.000,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

a. *Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.400.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 627.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.773.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Anggaran penetapan sebesar Rp. 9.999.700,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 842.700,00 sehingga menjadi Rp. 9.157.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Anggaran semula Rp. 2.089.558.552,00 mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 195.251.650,00 sehingga menjadi Rp. 2.284.810.202,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- 1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Anggaran penetapan sebesar Rp. 1.857.330.652,00; dalam perubahan bertambah sebesar Rp. 340.525.900,00 sehingga menjadi Rp. 2.197.856.552,00. Penambahan pagu anggaran terjadi dikarenakan adanya tambahan jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan. Perubahan juga terdapat pada target, dari awal 564 orang menjadi 830 orang. Mendapatkan tambahan anggaran DAU untuk 6 paket pelatihan dan anggaran DBHCHT untuk 1 paket pelatihan.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 5.312.800,00 sehingga menjadi Rp. 4.687.200,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Anggaran penetapan sebesar Rp. 20.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 6.896.100,00 sehingga menjadi Rp. 13.103.900,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

Anggaran penetapan sebesar Rp. 9.999.900,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.968.250,00 sehingga menjadi Rp. 5.031.650,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

d. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Anggaran penetapan sebesar Rp. 167.228.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 126.511.100,00 sehingga menjadi Rp. 40.716.900,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran. Perubahan juga dilakukan pada target kinerja yang semula 40 perusahaan menjadi 20 perusahaan, dikarenakan pagu anggaran hanya cukup digunakan untuk konsultasi produktivitas bagi 20 perusahaan.

e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Anggaran penetapan sebesar Rp. 25.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.586.000,00 sehingga menjadi Rp. 23.414.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Anggaran semula Rp. 326.724.000,00 mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 51.951.000,00 sehingga menjadi Rp. 274.773.000,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

Anggaran penetapan sebesar Rp. 8.951.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.937.500,00 sehingga menjadi Rp. 7.013.500,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Anggaran penetapan sebesar Rp 15.450.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 6.899.750,00 sehingga menjadi Rp. 8.550.250,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Anggaran penetapan sebesar Rp. 4.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 2.134.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.866.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.024.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.976.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi

Anggaran penetapan sebesar Rp. 8.726.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 3.894.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.832.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

Anggaran penetapan sebesar Rp. 8.910.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.063.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.847.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Anggaran penetapan sebesar Rp. 8.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 3.094.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.906.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 7.530.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.470.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

3) Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

Anggaran penetapan sebesar Rp. 200.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 19.438.000,00 sehingga menjadi Rp. 180.562.500,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Anggaran penetapan sebesar Rp. 24.176.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.247.500,00 sehingga menjadi Rp. 22.928.500,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Anggaran penetapan sebesar Rp. 8.511.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 4.853.750,00 sehingga menjadi Rp. 3.657.250,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.596.000,00 sehingga menjadi Rp. 13.404.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

5. Program Hubungan Industrial

Anggaran semula Rp. 169.863.000,00 mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 60.163.850,00 sehingga menjadi Rp. 109.699.150,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Anggaran penetapan sebesar Rp. 6.903.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 3.064.800,00 sehingga menjadi Rp. 3.838.200,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan
Anggaran penetapan sebesar Rp. 5.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 2.389.600,00 sehingga menjadi Rp. 2.610.400,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Anggaran penetapan sebesar Rp. 20.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 3.435.000,00 sehingga menjadi Rp. 16.565.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran penetapan sebesar Rp. 21.750.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 7.927.950,00 sehingga menjadi Rp. 13.822.050,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

- 2) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.450.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 5.473.100,00 sehingga menjadi Rp. 9.976.900,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 3.595.800,00 sehingga menjadi Rp. 6.404.200,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran penetapan sebesar Rp. 75.360.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 32.940.100,00 sehingga menjadi Rp. 42.419.900,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
- 5) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Anggaran penetapan sebesar Rp. 15.400.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 1.337.500,00 sehingga menjadi Rp. 14.062.500,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Anggaran semula Rp. 40.000.000,00 mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 5.441.000,00 sehingga menjadi Rp. 45.441.000,00. Perubahan di Dinas Tenaga Kerja antara lain terdapat pada:

- a. Kegiatan Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
Anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,00; dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 78.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.922.000,00. Pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan instruksi efisiensi anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
Anggaran penetapan sebesar Rp. 30.000.000,00; dalam perubahan bertambah sebesar Rp. 5.519.000,00 sehingga menjadi Rp. 35.519.000,00. Penambahan pagu anggaran terjadi dikarenakan penambahan kuota transmigrasi. Perubahan juga terdapat pada target, dari awal 1 kepala keluarga menjadi 2 kepala keluarga.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diatur dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD 2025 berlandaskan prioritas program pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

Dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.

Sragen, 03 Juli 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen



Agus Winarno, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710313 199803 1 008